



RENSTRA TAHUN 2025-2029

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis tahun 2025-2029 ini dibuat untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu memfokuskan pada pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna mendorong daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan peluang yang ada, sebagai perwujudan dari tanggung jawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan untuk membantu Bupati Tanjung Jabung Barat di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat *“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani”*.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini.

Kuala Tungkal, 6 November 2025

KEPALA SATUAN

M. H. DAUS INDRA, SE
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19780928 200604 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	7
2.1 Gambaran Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjab Barat	7
2.1.1 Tugas	7
2.1.2 Fungsi	7
2.1.3 Tipologi.....	8
2.1.4 Susunan Organisasi	8
2.1.5 Struktur Organisasi	9
2.1.6 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
2.1.7 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	25
2.1.8 Kelompok Sasaran Pelayanan.....	41
2.1.9 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	41
2.1.10 Kerja Sama Perangkat Daerah.....	43
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	44
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjab Barat	44
2.2.2 Isu Strategis	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1 Tujuan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029	49
3.2 Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029	50
3.3 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	53
3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	58
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
4.1 Program dan Kegiatan.....	62
4.2 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu indikatif.....	71

4.3 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	89
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	92
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	93
BAB V PENUTUP.....	98
5.1 Pedoman Transisi	98
5.2 Kaidah Pelaksanaan	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Keberadaan ASN dan TKK Menurut Latar Belakang Pendidikan ...	22
Tabel 2.	Keberadaan PNS Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	24
Tabel 4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024	29
Tabel 5.	Evaluasi Terhadap Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten /Kota Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Pelaksanaan : 2021 – 2024	30
Tabel 6.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	44
Tabel 7.	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	50
Tabel 8.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029	52
Tabel 9.	Tahapan Renstra Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat	56
Tabel 10.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029	57
Tabel 11.	Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	59
Tabel 12.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029	61
Tabel 13.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	62
Tabel 14.	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029	65
Tabel 15.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	72
Tabel 16.	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	89
Tabel 17.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	92
Tabel 18.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	93

Tabel 19. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	94
Tabel 20. Formulasi Indikator Kinerja Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Keberadaan ASN dan TKK Menurut Latar Belakang Pendidikan..	23
Grafik 2.	Keberadaan PNS Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	24
Grafik 3.	Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami banyak kemajuan dan perkembangan yang cepat, pembangunan perumahan sangat cepat dan padat untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal bagi penduduk. Tingginya pembangunan perumahan mendorong kebutuhan pembangunan sarana usaha dan industri untuk melayani penduduk yang tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pesatnya perkembangan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun selain membawa dampak positif, kondisi tersebut juga menimbulkan dampak negatif yaitu tumbuhnya wilayah yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat merugikan masyarakat. Begitu pentingnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, mengharuskan pemerintah untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tanpa terkecuali.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan penduduk yang memiliki beragam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, latar belakang pendidikan, menimbulkan potensi terjadinya gesekan antar kelompok masyarakat yang dapat merusak ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Penduduk yang beragam menimbulkan potensi besar terjadinya pergesekan dan gangguan ketenteraman serta ketertiban umum dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Hal seperti ini dapat mengganggu suasana aman dan berpotensi melanggar hak warga lainnya. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus mampu mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mencari solusi atas permasalahan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan untuk periode

5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program, anggaran dan indicator kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menyelaraskan antara tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan memandu perencanaan program, kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang sesuai dengan bingkai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan proses dan pendekatan sebagai berikut :

1. Proses Teknokratik

Proses teknokratik dalam penyusunan Renstra SKPD adalah proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana. Proses teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra SKPD. Rancangan teknokratik Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun mendatang berfokus pada pencapaian tujuan RPJMD Tahun 2025-2029.

2. Proses Politik

Proses politik dalam penyusunan Renstra SKPD merupakan proses penyusunan rencana strategis SKPD yang diselaraskan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Proses politik ini merupakan kelanjutan dari proses teknokratik dan menghasilkan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

3. Penetapan Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan. Penetapan Rencana Strategis dilakukan setelah dilakukan penyesuaian dengan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Persiapan, Penyusunan, dan Penetapan Renstra.

Selanjutnya, keterkaitan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029. Rencana Strategis tersebut selanjutnya akan dijabarkan secara tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) agar kegiatan yang direncanakan dapat dianggarkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 adalah sebagai pedoman dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kegiatan lima tahunan, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.
2. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah.
3. Menguraikan secara rinci daftar Program dan Kegiatan prioritas dalam periode lima tahun melalui sumber pendanaan APBD yang berimplikasi kepada Rencana APBD.
4. Sebagai acuan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- 2.1. Gambaran Pelayanan SatPol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

- 2.1.1 Tugas
- 2.1.2 Fungsi
- 2.1.3 Tipologi
- 2.1.4 Susunan Organisasi
- 2.1.5 Struktur Organisasi
- 2.1.6 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.1.7 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.1.8 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.1.9 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.1.10 Kerja Sama Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjab Barat
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra SatPol PP Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra SatPol PP Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi SatPol PP dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program dan Kegiatan
- 4.2. Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.3. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

- 5.1. Pedoman Transisi
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Gambaran Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjab Barat

2.1.1 Tugas

Pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pasal 418, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 419, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tipologi

Adapun tipologi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Pasal 420 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat adalah sebagai berikut :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.4 Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pasal 420 adalah sebagai berikut :

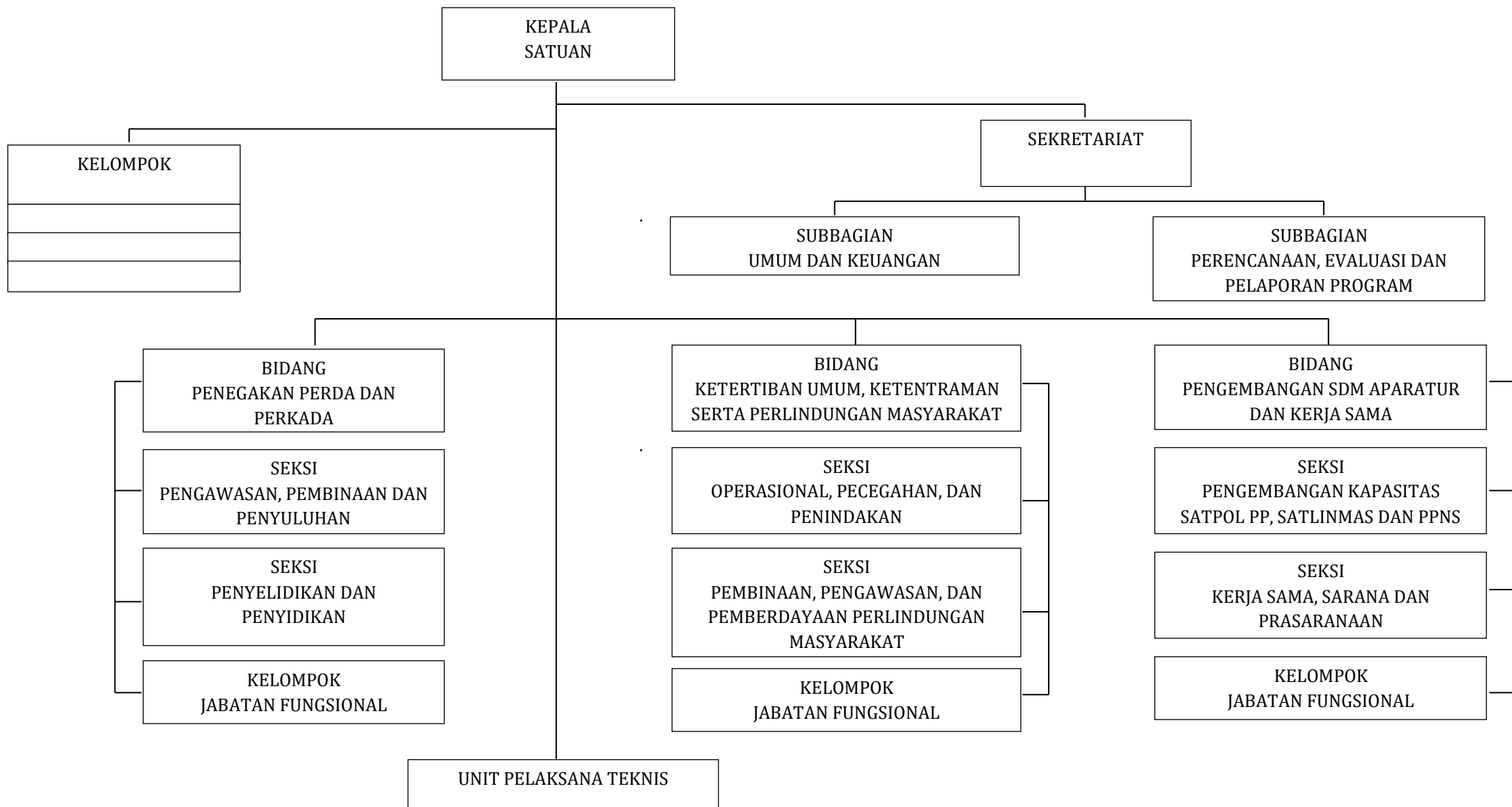
- 1. Kepala Satuan
- 2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- 3. Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;
 - b. Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 6. Unit Pelaksana Teknis.

2.1.5 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



I. Kepala Satuan

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
 - pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Keuangan

Subagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, serta urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

- melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
- melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

III. Bidang Penegakan Perda dan Perkada

Bidang Penegakan Perda dan Perkada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Penegakan Perda dan Perkada dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
- pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya.
- pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;

- pelaksanaan pengawasan Perda kabupaten;
- penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkara, hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik Pegawai negeri Sipil; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan

Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada. Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyuluhan penegakan Perda dan Perkada. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melaksanakan pengawasan, pembinaan, penyuluhan perda dan perkara;
- melaksanakan penegakan perda dan perkara;
- melaksanakan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
- melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
- melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perkara; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
- melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
- melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
- melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan kepolisian;
- melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
- melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
- melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
- melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
- melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

IV. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas).
- penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Operasional, Pencegahan dan Penindakan

Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat. Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Operasional, Pencegahan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penindakan, pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melakukan pencegahan tindak gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- melakukan penindakan terhadap tindak gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
- melakukan pengamanan aset-aset daerah;
- melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
- melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
- melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
- melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat. Seksi

Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
- melakukan pembinaan internal personil;
- melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

V. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama

Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang pengembangan SDM aparatur dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bidang pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;
- penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana;
- penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kerja sama; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS

Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama. Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melakukan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas;

- melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS
- melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana

Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama. Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan lingkup kerja sama, sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
- melakukan koordinasi dalam rangka kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- melakukan penyusunan laporan hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta sarana dan prasarana; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.6 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber Daya Manusia merupakan semua orang yang bekerja dalam suatu organisasi dan berkontribusi dengan keterampilan, pengetahuan dan pengalaman mereka. SDM adalah factor penting dalam menggerakkan roda organisasi baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam menciptakan inovasi dan pengembangan

Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber daya Manusia antara lain mencakup beberapa aspek :

1. Kapasitas untuk berkreasi dan bekerja (aktif).
2. Pemerataan distribusi komposisi yang sesuai kapasitas dan kualifikasi.
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang yang sesuai dengan porsinya.
4. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri.
5. Kesadaran dan interpedensi.

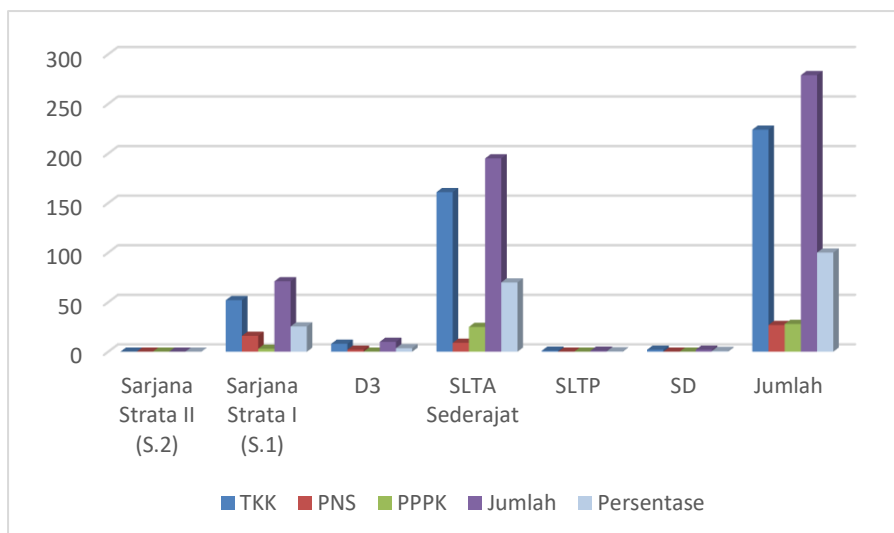
SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini didasari dengan latar belakang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Keberadaan ASN dan TKK Menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	TKK	PNS	PPPK	Jumlah	Persentase
1	Sarjana Strata II (S.2)	-	-	-	-	0,00
2	Sarjana Strata I (S.1)	52	16	3	71	25,45
3	D3	8	2	0	10	3,58
4	SLTA Sederajat	161	9	25	195	69,89
5	SLTP	1	-	-	1	0,36
6	SD	2	-	-	2	0,72
	Jumlah	224	27	28	279	100,00

Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Grafik 1. Keberadaan ASN dan TKK Menurut Latar Belakang Pendidikan



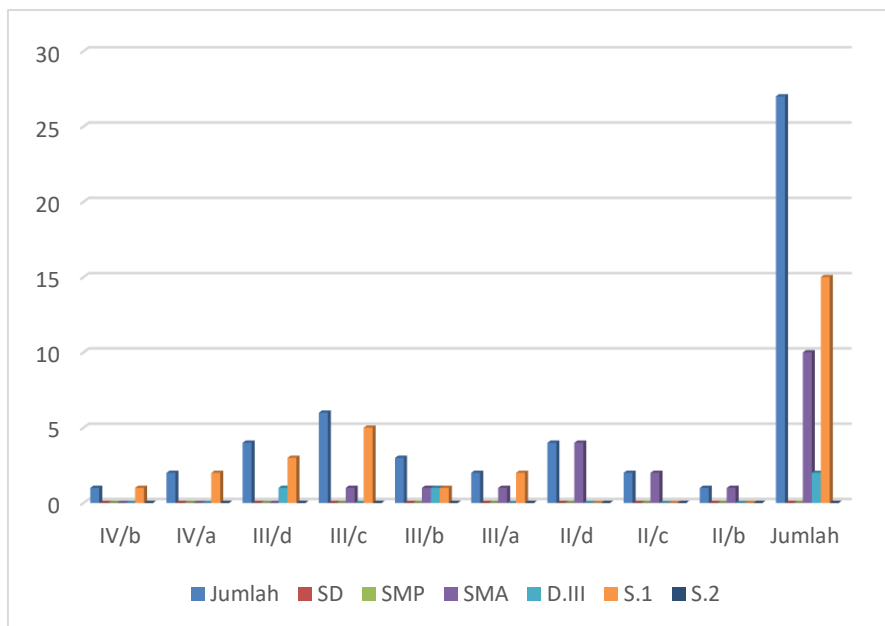
Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Tabel 2. Keberadaan PNS Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Gol	Jumlah	Pendidikan Umum					
			SD	SMP	SMA	D.III	S.1	S.2
1.	IV/b	2	-	-	-	-	2	-
2.	IV/a	1	-	-	-	-	1	-
3.	III/d	4	-	-	-	1	3	-
4.	III/c	6	-	-	1	-	5	-
5.	III/b	3	-	-	1	1	1	-
6.	III/a	2	-	-	1	-	2	-
7.	II/d	4	-	-	4	-	-	-
8.	II/c	2	-	-	2	-	-	-
9.	II/b	1	-	-	1	-	-	-
	Jumlah	27			10	2	15	-

Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Grafik 2. Keberadaan PNS Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan



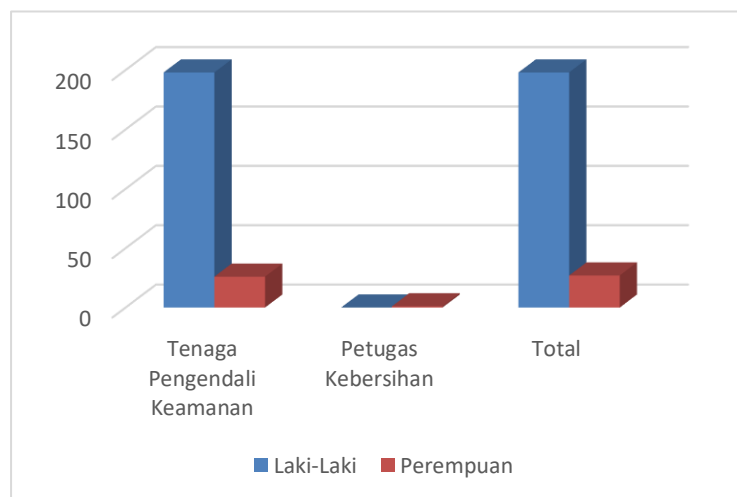
Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Tabel 3. Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Tenaga Pengendali Keamanan	198	26
2	Petugas Kebersihan	-	1
Total		198	27

Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Grafik 3. Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Sumber data : DUK Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

2.1.7 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai program organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

A. Urusan Sekretariat

Sekretariat Satpol PP dipimpin oleh seorang sekretaris melaksanakan pelayanan administratif yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, penganggaran, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum, perencanaan program kedinasan, evaluasi dan pelaporan.

B. Urusan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan Masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku, berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

C. Urusan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat

Dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 6 sebanyak 1 (satu) unit, Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 4 (empat) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 7 (tujuh) unit, kendaraan roda 2 untuk operasional lapangan sebanyak 4 (empat) unit, disamping prasarana dan personal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga didukung dengan regulasi kegiatan yang mendukung upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan dan pengawalan, patroli gangguan trantibum, operasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta cakupan perlindungan masyarakat, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol PP, yaitu :

1. Kewenangan Satpol PP

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

2. Kewajiban Satpol PP

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.

- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan melakukan :

1. Kegiatan patroli gangguan trantibum, yang meliputi kegiatan pemantauan wilayah, pengawasan terhadap pelanggaran Perda dan penanganan terhadap gangguan trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi kegiatan operasi penertiban pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pengamanan aset daerah yang bersifat operasi non yustisi.

Dalam kegiatan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan kegiatan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur Pemerintah Daerah. Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan satlinmas dan pos keamanan lingkungan (Poskamling) di masing-masing desa atau kelurahan wajib dilaksanakan guna mendeteksi secara dini adanya kegiatan di lingkungan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Keikutsertaan satlinmas Desa/Kelurahan yang diperbantukan untuk pelaksanaan siaga keamanan lingkungan desa/kelurahan serta melaksanakan pelayanan teknis dalam rangka memelihara dan memperkuat ketahanan rakyat terhadap gangguan dan ancaman dari segala bidang, berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam upaya pencegahan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan penanggulangan akibat bencana serta berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilihan umum.

D. Urusan Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerjasama

Dalam melaksanakan fungsinya SatPol PP Tanjung jabung Barat perlu memiliki personil yang terlatih, cekatan terampil, serta memiliki kapasitas yang baik untuk bertugas di lapangan. Kemajuan zaman menuntut anggota Satpol PP untuk terus *mengupgrade* kemampuan diri seiring dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

tugas. Selain itu bidang pengembangan SDM aparatur juga berupaya meningkatkan kapasitas satlinmas Desa / Kelurahan dalam pemahaman dan pelaksanaan tugas dan fungsi linmas untuk keamanan lingkungan. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya melalui bina jasmani, kesamaptaan dan pendidikan dasar. Kemampuan yang dimiliki anggota tentunya sangat bermanfaat untuk bekal personel Ketika bertugas di lapangan.

Disamping itu bidang pengembangan SDM aparatur dan Kerjasama juga bertugas dalam membangun kerjasama dengan pihak terkait baik di dalam kabupaten, kabupaten tetangga ataupun dengan Kabupaten di Provinsi tetangga seperti Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adapun kerjasama yang dibentuk adalah kerjasama dalam mendukung kegiatan ketentraman masyarakat, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang berada pada wilayah kerjasama. Kerjasama ini sangat diperlukan terutama sekali untuk saling menjaga dan mengantisipasi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah perbatasan.

Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi warga negara yang terkena dampak akibat Penegakkan Perda dan Perkada. Adapun layanan yang diberikan seperti layanan terhadap dampak kerugian material maupun layanan pengobatan bagi warga yang terkena dampak.

Adapun Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap Perda dan Perkada	82,65%	83,65%	84.01%	85%	100%	83%	80%	100 %	120%	99%	95,23 %	118%
2.	Persentase Tingkat pelanggaran perda dan Perkada	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada	30%	25%	20 %	15%			13,04 %	12%			153,4 %	125%
3.	Persentase Satlinmas yang dilatih	Terlaksananya peningkatan kapasitas Satlinmas Dssa / Kelurahan			4%	5%			6,92%	8,04%			173%	160%
4.	Persentase pencegahan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, pengawalan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
5	Nilai SPM	Tersedianya layanan ganti rugi akibat dampak penegakkan perda dan perkada bagi masyarakat			80 %	85%			99.52 %	100%			124,4 %	118%
6.	Nilai Sakip	Kategori Baik	60.44%	60.44%	60.44%	60,44 %	60,24 %	62,39 %	64,85 %	71,83 %	100%	103 %	107%	107,3 %
7.	Nilai IKM	Kategori Baik	76,61%	76,61%	76,61%	76,61 %			85,43 %	85,59 %			112%	112%

Sumber data : Sekretariat Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

**Tabel 5. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan : 2021 - 2024**

Form E.80

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggun Jawab										
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025											
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11	12		13	14		15	16		17		18		19		20		21	22	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terbitnya Lakip SKPD																												SatPol PP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	48	26.931.524	12	5.802.957	12	6.383.253	12	7.021.578	12	7.723.736	12	1.800.000	12	6.084.896	12	7.000.000	12	8.384.000	100%	31%	100%	95%	100%	100%	100%	109%		SatPol PP

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Pkt	169.402.007 247	36.501.186 60	40.151.305 60	44.166.436 62	48.583.080 65		36.501.184 60	42.410.120 60	43.160.823 62	43.417.000 65		100%	100%	100%	89%		SatPol PP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	8 Pkt	179.490.675 32	38.675.000 8	42.542.500 8	46.796.750 8	51.476.425 8		21.730.000 4	38.400.000 7	28.995.000 8	22.575.000 5		50%	56%	100%	44%		SatPol PP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Pkt	57.315.107 30	12.381.741 6	13.575.035 6	14.932.539 8	16.425.792 10		10.410.636 6	5.804.672 4	11.227.989 6	17.085.000 9		100%	84%	75%	104%		SatPol PP
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	27.846.000 4	6.000.000 1	6.600.000 1	7.260.000 1	7.986.000 1		3.790.000 1	5.130.000 1	5.580.000 1	5.980.000 1		100%	63%	100%	75%		SatPol PP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lpr	651.856.290 8	140.456.000 2	154.501.600 2	169.951.760 2	186.946.930 2		126.490.900 2	130.158.921 2	192.327.389 2	248.929.798 2		100%	90%	100%	133%		SatPol PP
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	810.950.000 15		245.000.000 5	269.500.000 5	296.450.000 5			282.700.000 1									SatPol PP

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	6	2.979.000.000	0	0	2	900.000.000	990.000.000	2	1.089.000.000	2	1.089.000.000	0	0	0	0	0	SatPol PP
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	14	33.100.000	0	0	4	10.000.000	11.000.000	4	12.100.000	6	12.100.000	0	0	0	201%	283%	SatPol PP
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	50	269.853.430	15	58.145.535	15	63.960.089	70.356.098	10	77.391.708	10	77.391.708	6	107.208.079	8	68.947.000	48.744.000	SatPol PP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3	2.998.178.000	0	0	1	1.500.000.000	165.000.000	1	1.333.178.000	1	1.333.178.000	1	48.950.000	0	0	0	SatPol PP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lpr	8	11.556.090	2	2.490.000	2	2.739.000	3.012.900	2	3.314.190	2	3.314.190	1	300.000	2.559.200	1.800.000	1.800.000	SatPol PP
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 lpr	6	89.107.200	1	19.200.000	1	21.120.000	23.232.000	2	25.555.200	2	25.555.200	1	10.528.539	12.039.807	25.000.000	25.000.000	SatPol PP

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lpr	20	122.673.600	4	33.600.000	3.696.000	40.656.000	44.721.600	6	83.925.000	72.300.000	26.600.000	100%	79%	100%	162%	100%	SatPol PP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	46	383.439.420	11	82.620.000	90.882.000	99.970.200	109.967.220	12	81.881.500	69.499.000	96.999.900	100%	117%	100%	63%	100%	SatPol PP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	13	205.706.292	3	44.323.700	48.756.070	53.631.677	58.994.845	4	110.568.000	73.040.750	39.068.700	67%	88%	100%	124%	75%	SatPol PP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	56	19.863.480	16	4.280.000	4.708.000	5.178.800	5.696.680	12	7.590.000	9.130.000	3.630.000	100%	85%	100%	160%	100%	SatPol PP
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	4	156.615.955	1	33.714.000	37.130.500	40.843.550	44.927.905	1	25.007.000	345.205.370	28.723.200	100%	85%	100%	768%	100%	SatPol PP

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab	
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
2	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Tingkat pelanggaran Perda/Perbup																			Satpol PP	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	6	50.771.730	10.939.825	1	12.033.808	2	14.560.908	2	13.237.189	1	10.480.000	1	5.120.000	1	1.070.000	2.867.000			Satpol PP
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dok	3	264.800.000	0	0	80.000.000	1	96.800.000	1	88.000.000	1	0	0	0	1	57.280.000	13.145.900			Satpol PP

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab							
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025								
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	44 Org		307,418,083	44	42,618,083	44	80,000,000	45	96,800,000			35	24,327,563	35	27,296,384	35	26,550,000	30	14,321,000							SatPol PP
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dok		281,000,000	0	0	1	100,000,000	1	71,000,000									1	4,100,000							SatPol PP
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dok		49,650,000	0	0	1	15,000,000	1	18,150,000									1	840,000							SatPol PP

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 org	50.000.000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Satpol PP
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	30 org	50.000.000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Satpol PP
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 Kasus	21.806.412.025	240	50	4.052.107.741	50	4.457.318.515	59.903.050.366	7.393.935.403	4.478.565.923	4.051.214.151	4.249.620.000	9.172.725.988	100%	111%	100%	124%	100%	Satpol PP
		Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	28 Kasus	128.740.000	84	0	0	28	54.000.000	59.400.000	15.340.000	0	0	28	1.972.400				13%	100%	Satpol PP

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab	
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
		melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan																				
		Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Lap	3	82.750.000	0	0	1	25.000.000	1	27.500.000	30.250.000						100%	13%	0%	0%	SatPol PP
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	8 Unit	28	49.650.000	0	0	8	15.000.000	10	16.500.000	18.150.000						20%	57%	16%		SatPol PP
		Dukungan Pelaksanaan Sidang atau Pelanggaran Peraturan daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 lap	1	20.000.000	0	0	0	0	1	0	20.000.000										SatPol PP
		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dok	1	15.000.000					1		15.000.000										SatPol PP

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab								
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025									
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 lap	3	112.400.000	0	0	1	40.000.000	1	44.000.000	1	28.400.000	0	0	1	16.288.486	1	10.448.900	14.988.000								SatPol PP
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 lap	3	249.800.000	0	0	1	80.000.000	1	88.000.000	1	81.800.000	0	0	1	29.507.500	1	25.632.000	52.394.420								SatPol PP
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 lap	3	171.550.000	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	66.550.000	0	0	1	77.299.700	1	43.028.500	43.028.500								SatPol PP
		Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Lap	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0								SatPol PP

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025		2021	2022			2023		2024		2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 lap		3	191.700.000			0		0		1		70.000.000			1		77.000.000			1		44.700.000			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Keterangan :

Singkatan	Kepanjangan	Makna Umum
ST	Sangat Tinggi	Capaian kinerja ≥ 90% dari target (bahkan bisa >100%); menunjukkan hasil yang melampaui target Renstra.
T	Tinggi	Capaian kinerja antara ±76%–89% dari target; masih dalam kategori baik atau sesuai target.
S	Sedang	Capaian 61%–75% dari target; perlu peningkatan.
R	Rendah	Capaian 51%–60%; jauh dari target.
SR	Sangat Rendah	Capaian ≤50%; menunjukkan kinerja yang perlu evaluasi besar.

Pada Formulir E.80 diatas dapat dilihat pencapaian Evaluasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021 - 2024. Dimana capaian kinerja pada akhir 2024 sebesar **92 %** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** yang artinya Organisasi berhasil mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam perencanaan rencana strategis, program kegiatan dijalankan dengan efektif dan efisien serta output dan outcome lebih baik dari rencana.

2.1.8 Kelompok Sasaran Pelayanan

Pada dasarnya tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dimana pelayanannya berupa penertiban atas pelanggaran perda/perkada, pencegahan gangguan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun kelompok sasaran pelayanan adalah :

1. Masyarakat umum dan kalangan pengusaha

Adapun yang dimaksud masyarakat umum disini adalah pedagang kaki lima (PKL), pengusaha, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis, serta masyarakat yang menyampaikan pengaduan terkait adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pemberian pelayanan disini diantaranya :

- a. pengamanan pejabat ketika melakukan kunjungan/dinas ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. pengamanan ketika ada acara penting di semua instansi pemerintah yang membutuhkan
- c. pemberian latihan terkait pelaksanaan upacara hari senin dan hari besar nasional kepada petuga upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.1.9 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan tugas terdapat mitra dalam pelayanan antara lain berupa kerjasama dan koordinasi sehingga ketenteraman dan ketertiban umum dapat terwujud. Kerjasama didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

Adapun beberapa mitra kerja Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertical lainnya.

2. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
3. Kerjasama dengan dinas lain seperti Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Kelurahan/Desa. Adapun kerjasama tersebut berupa koordinasi yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.
4. Satuan Perlindungan masyarakat, Babinkamtibmas Kepolisian dan Babinsa TNI dalam menjaga keamanan lingkungan di masyarakat. kerjasama dengan Satlinmas, Babinkamtibmas dan Babinsa yang berada di Desa / Kelurahan bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.
5. Bermitra dengan Dinas Perhubungan dan Badan Kesbangpol.
Dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dibutuhkan kerjasama dengan Dinas Perhubungan, yang bertujuan untuk pengamanan terkait lalu lintas dalam kegiatan pengamanan hari-hari besar, Pengamanan dan Pengawalan tamu pejabat, pengamanan Pilkada dan acara-acara besar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertujuan untuk pemantauan terhadap isu-isu / paham radikal yang berkembang di masyarakat yang berpotensi memberikan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta membahayakan negara.
6. Bermitra dengan Dinas Sosial Dalam kegiatan SatPol PP.
Satpol PP melaksanakan patroli wilayah, Adapun hasil patroli yaitu ditemukannya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), gelandangan, pengemis, anak jalanan, badut di pinggir jalan raya. Adapun tindak lanjut dari hasil penertiban tersebut dikoordinasikan dengan Dinas Sosial.

2.1.10 Kerja Sama Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerjasama, dimana kerjasama tersebut terdiri dari Kerjasama internal dan eksternal. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. Menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif;
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pihak dalam Penegakan Perda dan penanganan masalah Trantibumlinmas;
- c. Meningkatkan efektivitas pencegahan, penanganan dan penyelesaian masalah Trantibumlinmas;

Adapun bentuk kerjasama tersebut adalah :

- a. Kerjasama internal

Yaitu kerjasama yang dilakukan antar bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, misalnya kerjasama antara bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan bidang penegakan Perda dan Perkada serta Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerjasama, tidak menutup kemungkinan bidang sekretariat masuk didalamnya karena keadaan tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi dengan tiba-tiba, misalnya bencana alam, kerusuhan massa, sehingga dengan keadaan tersebut semua bidang harus bekerjasama dalam penanganannya. Adapun waktu kerjasama adalah setiap saat menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi.

- b. Kerjasama eksternal

Kerjasama eksternal yang dimaksud disini adalah kerjasama yang dilakukan dengan Kabupaten lain, instansi lain dan jajaran vertikal yang bertujuan untuk mewujudkan ketenterman dan ketertiban umum, adapun bentuk kerjasama tersebut adalah :

- a. Kerjasama “Tiga Pilar”

Kerjasama ini terdiri dari tiga instansi yakni Satpol PP, TNI dan POLRI. Tujuan dari Tiga Pilar ini adalah untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Kegiatan tiga pilar ini seperti melaksanakan patroli wilayah dengan sasaran tempat rawan begal dan tempat yang diduga terjadinya kegiatan

prostitusi, penyakit masyarakat serta wilayah yang rawan gangguan Trantibum.

Selain itu juga melaksanakan pengamanan bersama ketika terjadinya bencana alam seperti pengamanan ketika terjadi bencana alam. Kerjasama tiga pilar ini masuk dalam kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. Kerja sama antar Daerah/Wilayah Perbatasan

Kerjasama antara Kabupaten pada wilayah perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun tujuan kerjasama antar Daerah / Wilayah Perbatasan ini adalah untuk :

1. menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat di wilayah perbatasan dan atau di wilayah kewenangan,
2. Penanganan terkait adanya indikasi dan atau gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di wilayah perbatasan dan atau di wilayah kewenangan.
3. Monitoring, evaluasi dan saling berkoordinasi serta berkomunikasi terkait pelaksanaan kerjasama.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya beban yang harus dipikul oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat demikian besar, hal itu masih akan bertambah dengan ketidak maksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	PERMASALAHAN LINGKUP URUSAN	KEBIJAKAN/RENCANA PROGRAM OPD
1	Masih lemahnya pengembangan, peningkatan kapasitas dan	1 Peningkatan Kualitas SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

	bimbingan teknis bagi anggota SatPol PP dalam mendukung pelaksanaan tupoksinya	2	Penambahan tenaga PPNS dibidang Penegakan Perda dan Bidang Trantibumlinmas.
		3	Meningkatkan koordinasi antar Dinas/Instansi.
		4	Pembinaan, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil yang meliputi rencana kebutuhan personil, diklat, kelengkapan dan peralatan kerja.
		5	kegiatan untuk pendukung pengembangan, peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis secara rutin dan terjadwal seperti penguatan keahlian beladiri, penguatan fisik dan mental serta pentingnya peningkatan IMTAQ melalui bimbingan rohani agar terwujudnya anggota Satpol PP yang kuat secara fikiran, fisik dan mental.
2	Belum maksimalnya pemberdayaan Satlinmas Desa / Kelurahan dalam keamanan lingkungan	1	Peningkatan fungsi dan peran serta Linmas serta SDM anggota SatPol PP
		2	Peningkatan upaya perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan sumber daya petugas perlindungan masyarakat, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat, pengerahan tenaga linmas dalam membantu pengamanan TPS pada Pemilu, Pilpres dan Pilkada, serta perlunya mengerahkan tenaga linmas dalam operasi ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
3	Belum terciptanya sinergitas antara SatPol PP dan Satlinmas dalam pencegahan gangguan trantibum	1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
4	Belum meratanya pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dikalangan masyarakat	1	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
5	Belum optimalnya penegakkan Perda dan Perkada	1	Peningkatan penanganan terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman, perlindungan masyarakat dan keindahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
		2	Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Daerah dengan tujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi berjalannya Pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6	Belum efektifnya kerjasama dengan penegakan hukum dan instansi terkait dalam penegakkan perda dan perkada	1	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		2	Menjalin hubungan sinkronisasi, kerjasama, dan koordinasi yang harmonis dengan penegak hukum serta instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan tugas Satpol PP maupun dalam kehidupan sehari-hari
7	Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang penegakkan Perda dan perkada terkait aktifitas / usaha yang dijalankan	1	Sosialisasi Penegakkan Perda dan Perkada

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban umum serta penyebaran berbagai penyakit masyarakat (pekat) akibat pertumbuhan penduduk dan banyaknya penduduk pendatang.

Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti pengamanan dan penertiban, patroli gangguan trantibum dan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah.

Beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Masih lemahnya pengembangan, peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis bagi anggota SatPol PP dalam mendukung pelaksanaan tupoksinya
2. Belum maksimalnya pemberdayaan Satlinmas Desa/kelurahan dalam keamanan lingkungan
3. Belum terciptanya sinergitas antara SatPol PP dan Satlinmas dalam pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Belum meratanya pembinaan dan penyuluhan Peraturan daerah di kalangan masyarakat
5. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya pendatang yang mengadu nasib dengan berdagang pada tempat yang tidak dianjurkan, hal ini menimbulkan berbagai persoalan seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekat) sehingga gangguan kenyamanan dan ketentraman sering terjadi.
6. Adanya orang / pendatang yang transit melalui kota Kuala Tungkal dengan tujuan ke daerah lain/Kepulauan yang berpotensi

menimbulkan penyakit masyarakat seperti gelandangan, pengemis dan prostitusi.

7. Pergaulan bebas anak dibawah umur dan penggunaan zat adiktif, dimana sering terjadi anak-anak mempergunakan alat material berupa lem terjaring patroli saat menggunakan lem tersebut. Penyalah gunaan lem ini dapat mengganggu mental dan bisa berakibat mengganggu kenyamanan lingkungan.
8. Banyaknya gelandangan dan pengemis yang ditertibkan serta ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) yang diamankan, hal ini belum dapat dicarikan solusinya karena belum adanya rumah penampungan sementara pada dinas terkait
9. Belum efektifnya Kerjasama dengan penegakan hukum dan instansi terkait dalam penegakkan Perda dan Perkada
10. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang penegakkan Perda dan Perkada terkait aktifitas usaha yang dijalankan
11. Maraknya aktifitas usaha kafe dan karaoke yang menyediakan minuman beralkohol serta diduga menjadi tempat transaksi prostitusi.
12. Maraknya penggunaan zat adiktif dan peredaran narkoba.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 sejalan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

RPJMD tahap I ditujukan untuk penguatan pondasi pembangunan di segala bidang yang ditujukan untuk mewujudkan **Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, Dan Berkelanjutan** (Visi RPJPD 2025-2045).

Konsep pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2030 dapat tercermin dari konsep pembangunan yang dijabarkan menjadi **Visi** dan **Misi** Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

A. Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Visi adalah gambaran masa depan yang akan diwujudkan. Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dijabarkan menjadi program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah pada periode 2025-2030 yang telah ditetapkan.

Adapun Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yaitu :

“Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani”

BERKAH ;

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis)

MADANI ;

(Mandiri dan ber-Inovasi)

B. Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan **3 (tiga) Misi** pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam **misi ke-1** yaitu Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif serta **misi ke-2** yaitu Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik

3.1 Tujuan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Maka SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk pada tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada **tujuan ke-2** yakni :

“Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial”

Transformasi pembangunan sosial yang tenteram, tertib, mantap, dan inovatif berarti perubahan yang berkelanjutan dalam bidang sosial yang ditujukan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang damai, teratur, stabil, dan berinovasi. Transformasi ini melibatkan peningkatan kualitas hidup, pemerataan, dan kemajuan sosial melalui berbagai upaya yang kreatif dan adaptif. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui transformasi pembangunan sosial yang tenteram, tertib, mantap, dan inovatif adalah tingkat partisipasi dalam program jaminan Kesehatan (%).

3.2 Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk pada sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

“Sasaran ke 6 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kondisi dimana masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, tertib, dan teratur, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini mencakup menjaga keamanan, mengendalikan gangguan, dan memastikan penegakan hukum.

Tabel 7.
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	14,21 %	19,44 %	26,92 %	34,40 %	41,88 %	49,36 %
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan public perangkat daerah	4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,88 (Baik)	86,00 (Baik)	86,30 (Baik)	86,50 (Baik)	86,80 (Baik)	87,00 (Baik)
			5. Nilai AKIP	72 (BB)	80,10 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)

Tabel 8.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Visi	Misi		Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Target Tahun				
							2025	2026	2027	2028	2029
Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI	1	Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif	Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Terciptanya kondisi social yang aman, tertib dan kondusif bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bertanggungjawab dan berorientasi hasil	72 (BB)	80,10 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)
				Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Terwujudnya layanan public yang mudah diakses, berkualitas, responsive dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	85,88 (Baik)	86,00 (Baik)	86,30 (Baik)	86,50 (Baik)	86,80 (Baik)

3.3 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya-upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 (lima) tahun ke depan. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada **Misi I** yaitu berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif maka disusun strategi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam salah satu **strategi pembangunan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni :

“Peningkatan sosialisasi dan edukasi ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban”

Adapun Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penegak ketertiban
2. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan keetrtiban lingkungan

Secara rinci Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung barat dalam mendukung visi misi Bupati Tanjung Jabung barat sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Perkada
2. Pemberdayaan Satlinmas dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum

3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan Satlinmas.
4. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian gangguan trantibum dan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
5. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
6. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati
7. Pembentukan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Masyarakat, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Instansi Pemerintah, Lembaga Pemerintah di Daerah, DPRD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan, Pemonudukan Dan Atau Asrama, Media Massa Dan Rumah Ibadah.
9. Melakukan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Masyarakat, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Instansi Pemerintah, Lembaga Pemerintah Di Daerah, DPRD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan Dan Tempat Hiburan, Pemonudukan Dan Atau Asrama, Media Massa Dan Rumah Ibadah Terutama Di Lokasi-lokasi Terindikasi Menjadi Tempat Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika.
10. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa/Kelurahan

11. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak berwenang seperti Aparat Penegak Hukum, BNN dan Lembaga Berwenang Lainnya.
12. Melaksanakan kegiatan patroli rutin dan razia di lokasi yang terindikasi menjadi tempat maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Adapun pada **Misi ke-2** disusun **strategi pembangunan** daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

Dengan arah kebijakan untuk 5 tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, koordinasi administrasi,
- b. Peningkatan tata kelola keuangan dengan pengawasan dan akuntabilitas.
- c. Penguatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- b. Perluasan penerapan sistem e-government yang efektif dan menumbuhkan budaya pelayanan prima

Dengan arah kebijakan 5 tahun ke depan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik
- b. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang menangani pelayanan publik,
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan teknologi informasi
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik.

Tabel 9. Tahapan Renstra SatPol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan publik kepada masyarakat	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah Gubernur sesuai standar	Pembinaan PPNS Kabupaten	Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Tabel 10.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi I : Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif			
2. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturnya penegak ketertiban 2. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar instansi (Satuan Polisi Pamong Praja, unit Pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana) dalam menjaga ketertiban dan keamanan 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
Misi II : Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			
3. Penguatan dan pengintegrasian tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (<i>good governance</i>)
4. Percepatan integrasi pelayanan publik yang prima	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan publik kepada masyarakat	Perluasan penerapan sistem e-government yang efektif dan menumbuhkan budaya pelayanan prima

3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada **Misi I** yaitu **Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif** maka disusun strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Dengan **arah kebijakan** 5 tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur penegak ketertiban (Satpol PP dan Satlinmas)
2. Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai
3. Penguatan kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas
4. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pelaporan dan pemantauan ketertiban
6. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum
7. Pelibatan aktif tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan dalam pembinaan keamanan lingkungan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada **Misi II** yaitu **Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik** maka disusun strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

2. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

Dengan **arah kebijakan** 5 tahun kedepan dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, koordinasi administrasi.
- b. Peningkatan tata kelola keuangan dengan pengawasan dan akuntabilitas.
- c. Penguatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

3. Perluasan penerapan sistem e-government yang efektif dan menumbuhkan budaya pelayanan prima

Dengan **arah kebijakan** 5 tahun ke depan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang menangani pelayanan publik.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan teknologi informasi.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik.

Tabel 11. Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD
1	2	3	4
1	Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparaturnya penegak ketertiban (Satpol PP dan Satlinmas)	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan Satlinmas
		Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai	Pengadaan sarana dan sarana Ketentraman dan ketertiban umum
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Penguatan kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas	Pembentukan satlinmas Kabupaten, Satlinmas Kecamatan, Satlinmas Desa dan Kelurahan
		Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak berwenang dan instansi terkait seperti Aparat Penegak Hukum, BNN dan Lembaga Berwenang Lainnya
		Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pelaporan dan pemantauan ketertiban	Pelaporan Kegiatan SatPol PP melalui Aplikasi Sistem Informasi Polisi Pamong Praja, website dan media sosial
		Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum	Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM	Pelibatan aktif tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan dalam pembinaan keamanan lingkungan	Pemberdayaan Satlinmas dalam keamanan lingkungan
4	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparaturnya, koordinasi administrasi,	Pemenuhan Komponen AKIP

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
5	Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan tata kelola keuangan dengan pengawasan dan akuntabilitas.	Menindaklanjuti LHP atas penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
6	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang menangani pelayanan publik	Peningkatan Kapasitas SDM SatPol PP
		Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan teknologi informasi	Merespon pengaduan masyarakat melalui layanan pengaduan whatsapp / call center

Tabel 12.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, dan Berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi I : Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif			
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturnya penegak ketertiban	1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparaturnya penegak ketertiban (Satpol PP dan Satlinmas) 2. Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai 3. Penguatan kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas
		2. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	1. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pelaporan dan pemantauan ketertiban
		3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum 2. Pelibatan aktif tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan dalam pembinaan keamanan lingkungan
Misi II : Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			
Terwujudnya penguatan dan pengintegrasian tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (<i>good governance</i>)	Peningkatan kapasitas dan kinerja aparaturnya, koordinasi administrasi,
			Peningkatan tata kelola keuangan dengan pengawasan dan akuntabilitas.
Terwujudnya percepatan integrasi pelayanan publik yang prima	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan publik kepada masyarakat	Perluasan penerapan sistem e-government yang efektif dan menumbuhkan budaya pelayanan prima	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang menangani pelayanan publik,
			Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan teknologi informasi

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat memberikan arahan pembangunan dan indikator kinerja dalam periode 2025–2029.

Tabel 13.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Pengadaan Mebel
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
2.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
6.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
7.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
8.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
9.	Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

	10.	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	11.	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
	12.	Penyediaan Layanan Informasi dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	13.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
	2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
	1.	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan daerah
	2.	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
	3.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	4.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	5.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
	1.	Pembentukan Sekretariat PPNS
	2.	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
	3.	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
	4.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 2 program, 10 Kegiatan dan 52 Sub kegiatan

Tabel 14. Rumusan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat (Inmendagri)						
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bertanggungjawab dan berorientasi hasil	Nilai AKIP Perangkat Daerah Naik	Nilai AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Terwujudnya layanan public yang mudah diakses berkualitas, responsive dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Hasil rata-rata persepsi masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
				Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Jumlah operasi penegakan Perda, jumlah pelatihan Linmas, laporan	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta					

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		perlindungan masyarakat		penyelesaian gangguan	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas		
			Terciptanya kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas		
			Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
						Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
						Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
						Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	
				Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah laporan hasil Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
						Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	
						Pembentukan Sekretariat PPNS	
						Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
						Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	

4.2 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					25.435.522.191,00		28.369.928.333,00		30.640.456.772,00		32.851.455.163,00		32.851.455.163,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.361.780.056,00		19.526.911.984,00		20.938.638.789,00		22.204.955.380,00		22.204.955.380,00	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	85,59	85,88	86	17.361.780.056,00	86,30	19.526.911.984,00	86,50	20.938.638.789,00	86,80	22.204.955.380,00	87	22.204.955.380,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai AKIP OPD (*)	71,83	79	80,10		81		82		83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN					8.073.742.135,00		8.843.016.349,00		9.701.817.983,00		10.646.499.783,00		10.646.499.783,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	8,04	14,2 1	19,44	8.073.742.135, 00	26,92	8.843.016.349, 00	34,40	9.701.817.983, 00	41,88	10.646.499.783 ,00	49,36	10.646.499.783 ,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Tingkat penyelesaian penyelenggaraan K3 (Ketenteraman, Ketertiban, Keindahan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					25435522191.0 0		28369928333.0 0		30640456772.0 0		32851455163.0 0		32851455163.0 0	

Tabel 15. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					25.435.522.1 91,00		28.369.928.3 33,00		30.640.456.7 72,00		32.851.455.1 63,00		32.851.455.1 63,00			
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.361.780.0 56,00		19.526.911.9 84,00		20.938.638.7 89,00		22.204.955.3 80,00		22.204.955.3 80,00			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	85,59	85,88	86	17.361.780.0 56,00	86,30	19.526.911.9 84,00	86,50	20.938.638.7 89,00	86,80	22.204.955.3 80,00	87	22.204.955.3 80,00	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
	Nilai AKIP OPD (*)	71,83	79	80,10		81		82		83		84				
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000,0 0		75.000.000,0 0		82.500.000,0 0		90.750.000,0 0		90.750.000,0 0			
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0	1	75.000.000,0 0	1	75.000.000,0 0	1	82.500.000,0 0	1	90.750.000,0 0	1	90.750.000,0 0			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daerah (Dokumen)															
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)		0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERA N GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		0	1		1		1		1		1				
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		11.000.000,0 0		12.100.000,0 0		12.100.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		0	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0	1	11.000.000,0 0	1	12.100.000,0 0	1	12.100.000,0 0			
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		11.000.000,0 0		12.100.000,0 0		12.100.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		0	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0	1	11.000.000,0 0	1	12.100.000,0 0	1	12.100.000,0 0			
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		11.000.000,0 0		12.100.000,0 0		12.100.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0	1	11.000.000,0 0	1	12.100.000,0 0	1	12.100.000,0 0			
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		11.000.000,0 0		12.100.000,0 0		12.100.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0	1	11.000.000,0 0	1	12.100.000,0 0	1	12.100.000,0 0			
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		11.000.000,0 0		12.100.000,0 0		12.100.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0	1	11.000.000,0 0	1	12.100.000,0 0	1	12.100.000,0 0			
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		16.500.000,0 0		18.150.000,0 0		18.150.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	16.500.000,00	12	18.150.000,00	12	18.150.000,00			
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	12.100.000,00			
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.855.818.174,00		8.200.000.000,00		9.020.000.000,00		9.922.000.000,00		9.922.000.000,00			
Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	12	12	12	6.855.818.174,00	12	8.200.000.000,00	12	9.020.000.000,00	12	9.922.000.000,00	12	9.922.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tugas ASN (Dokumen)															
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	55	75		85		100		100		100				
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.635.818.17 4,00		8.000.000.00 0,00		8.800.000.00 0,00		9.680.000.00 0,00		9.680.000.00 0,00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	55	75	6.635.818.17 4,00	85	8.000.000.00 0,00	100	8.800.000.00 0,00	100	9.680.000.00 0,00	100	9.680.000.00 0,00			
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					220.000.000, 00		200.000.000, 00		220.000.000, 00		242.000.000, 00		242.000.000, 00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	220.000.000, 00	12	200.000.000, 00	12	220.000.000, 00	12	242.000.000, 00	12	242.000.000, 00			
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.046.306.00 0,00		1.147.936.60 0,00		1.259.230.26 0,00		1.061.306.00 0,00		1.061.306.00 0,00			
Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	4	4	1.046.306.00 0,00	4	1.147.936.60 0,00	4	1.259.230.26 0,00	4	1.061.306.00 0,00	4	1.061.306.00 0,00			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	35	5	5		5		5		5		5				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					966.306.000, 00		1.062.936.60 0,00		1.169.230.26 0,00		966.306.000, 00		966.306.000, 00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	4	4	966.306.000, 00	4	1.062.936.60 0,00	4	1.169.230.26 0,00	4	966.306.000, 00	4	966.306.000, 00			
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					80.000.000,0 0		85.000.000,0 0		90.000.000,0 0		95.000.000,0 0		95.000.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	35	5	5	80.000.000,0 0	5	85.000.000,0 0	5	90.000.000,0 0	5	95.000.000,0 0	5	95.000.000,0 0			
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					351.707.247, 00		437.783.820, 00		475.876.130, 00		523.463.741, 00		523.463.741, 00			
Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	351.707.247, 00	12	437.783.820, 00	12	475.876.130, 00	12	523.463.741, 00	12	523.463.741, 00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kantor yang Disediakan (Paket)															
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	6	12		12		12		12		12				
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor					5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		6.655.000,00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	1	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	6.655.000,00			
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					44.166.436,0 0		48.315.300,0 0		53.441.388,0 0		58.785.526,0 0		58.785.526,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	12	12	44.166.436,0 0	12	48.315.300,0 0	12	53.441.388,0 0	12	58.785.526,0 0	12	58.785.526,0 0			
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					46.796.750,0 0		51.476.425,0 0		56.624.068,0 0		62.286.474,0 0		62.286.474,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10	12	46.796.750,0 0	12	51.476.425,0 0	12	56.624.068,0 0	12	62.286.474,0 0	12	62.286.474,0 0			
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					19.875.208,0 0		21.862.729,0 0		18.068.371,0 0		19.875.208,0 0		19.875.208,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	6	12	19.875.208,0 0	12	21.862.729,0 0	12	18.068.371,0 0	12	19.875.208,0 0	12	19.875.208,0 0			
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					9.663.060,00		10.629.366,0 0		11.692.303,0 0		12.861.533,0 0		12.861.533,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	9.663.060,00	12	10.629.366,0 0	12	11.692.303,0 0	12	12.861.533,0 0	12	12.861.533,0 0			
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					226.205.793, 00		300.000.000, 00		330.000.000, 00		363.000.000, 00		363.000.000, 00		Tungka I Ulu	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	226.205.793, 00	12	300.000.000, 00	12	330.000.000, 00	12	363.000.000, 00	12	363.000.000, 00			
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.599.479.34 7,00		4.182.967.36 4,00		4.573.085.77 9,00		5.030.394.35 7,00		5.030.394.35 7,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4	4	3.599.479.34 7,00	4	4.182.967.36 4,00	4	4.573.085.77 9,00	4	5.030.394.35 7,00	4	5.030.394.35 7,00			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	3		3		3		3		3				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	21	5		5		5		5		5				
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	17	8	8		8		8		8		8				
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					550.000.000, 00		605.000.000, 00		665.500.000, 00		732.050.000, 00		732.050.000, 00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5	5	550.000.000, 00	5	605.000.000, 00	5	665.500.000, 00	5	732.050.000, 00	5	732.050.000, 00			
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas					1.317.690.00 0,00		1.449.459.00 0,00		1.594.404.90 0,00		1.753.845.39 0,00		1.753.845.39 0,00		KAB. TANJU NG JABUN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Operasional atau Lapangan															G BARAT	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4	4	1.317.690.00 0,00	4	1.449.459.00 0,00	4	1.594.404.90 0,00	4	1.753.845.39 0,00	4	1.753.845.39 0,00			
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					25.000.000,0 0		25.500.000,0 0		28.050.000,0 0		30.855.000,0 0		30.855.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	17	8	8	25.000.000,0 0	8	25.500.000,0 0	8	28.050.000,0 0	8	30.855.000,0 0	8	30.855.000,0 0			
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					93.643.967,0 0		103.008.364, 00		85.130.879,0 0		93.643.967,0 0		93.643.967,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	21	5	93.643.967,0 0	5	103.008.364, 00	5	85.130.879,0 0	5	93.643.967,0 0	5	93.643.967,0 0			
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.613.145.38 0,00		2.000.000.00 0,00		2.200.000.00 0,00		2.420.000.00 0,00		2.420.000.00 0,00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	3	1.613.145.38 0,00	3	2.000.000.00 0,00	3	2.200.000.00 0,00	3	2.420.000.00 0,00	3	2.420.000.00 0,00			
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					5.079.931.96 2,00		5.084.425.15 8,00		5.089.267.67 4,00		5.094.494.44 1,00		5.094.494.44 1,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pemerintahan Daerah																
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	12	5.079.931.962,00	12	5.084.425.158,00	12	5.089.267.674,00	12	5.094.494.441,00	12	5.094.494.441,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.010.170,00		4.411.187,00		4.852.306,00		5.337.536,00		5.337.536,00		KAB. TANJUNGPABARAT	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	4.010.170,00	12	4.411.187,00	12	4.852.306,00	12	5.337.536,00	12	5.337.536,00			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.921.792,00		34.013.971,00		37.415.368,00		41.156.905,00		41.156.905,00		KAB. TANJUNGPABARAT	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12	12	12	30.921.792,00	12	34.013.971,00	12	37.415.368,00	12	41.156.905,00	12	41.156.905,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)															
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					45.000.000,0 0		46.000.000,0 0		47.000.000,0 0		48.000.000,0 0		48.000.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	12	45.000.000,0 0	12	46.000.000,0 0	12	47.000.000,0 0	12	48.000.000,0 0	12	48.000.000,0 0			
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5.000.000.00 0,00		5.000.000.00 0,00		5.000.000.00 0,00		5.000.000.00 0,00		5.000.000.00 0,00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	5.000.000.00 0,00	12	5.000.000.00 0,00	12	5.000.000.00 0,00	12	5.000.000.00 0,00	12	5.000.000.00 0,00			
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					353.537.326, 00		398.799.042, 00		438.678.946, 00		482.546.841, 00		482.546.841, 00			
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	9	15	353.537.326, 00	15	398.799.042, 00	15	438.678.946, 00	15	482.546.841, 00	15	482.546.841, 00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	9	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)															
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7	10		10		10		10		10				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		199.650.000,00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	12	150.000.000,00	12	165.000.000,00	12	181.500.000,00	12	199.650.000,00	12	199.650.000,00			
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas					140.000.000,00		154.000.000,00		169.400.000,00		186.340.000,00		186.340.000,00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Operasional atau Lapangan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7	10	140.000.000,00	10	154.000.000,00	10	169.400.000,00	10	186.340.000,00	10	186.340.000,00			
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.174.560,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00		KAB. TANJUNGPABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	9	15	9.174.560,00	15	20.000.000,00	15	22.000.000,00	15	24.200.000,00	15	24.200.000,00			
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					54.362.766,00		59.799.042,00		65.778.946,00		72.356.841,00		72.356.841,00		KAB. TANJUNGPABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	54.362.766,00	1	59.799.042,00	1	65.778.946,00	1	72.356.841,00	1	72.356.841,00			
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.073.742.135,00		8.843.016.349,00		9.701.817.983,00		10.646.499.783,00		10.646.499.783,00			
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	8,04	14,21	19,44	8.073.742.135,00	26,92	8.843.016.349,00	34,40	9.701.817.983,00	41,88	10.646.499.783,00	49,36	10.646.499.783,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
														PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100				
	Tingkat penyelesaian penyelenggaraan K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) (%)	100	100	100		100		100		100		100				
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					7.339.242.13 5,00		8.063.166.34 9,00		8.859.482.98 3,00		9.735.431.28 3,00		9.735.431.28 3,00			
Terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	4	7.339.242.13 5,00	4	8.063.166.34 9,00	4	8.859.482.98 3,00	4	9.735.431.28 3,00	4	9.735.431.28 3,00			
	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraa n ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)			1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)			40		40		40		40		40				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	17	4	10		10		12		15		15				
	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan	12	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)															
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)			80		80		80		80		80				
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan			30		30		30		30		30				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	kapasitas (Orang)															
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					17.618.698,0 0		19.380.568,0 0		21.318.624,0 0		23.450.487,0 0		23.450.487,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	4	17.618.698,0 0	4	19.380.568,0 0	4	21.318.624,0 0	4	23.450.487,0 0	4	23.450.487,0 0			
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					117.128.000, 00		128.840.800, 00		141.724.880, 00		155.897.368, 00		155.897.368, 00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	1	1	117.128.000,00	1	128.840.800,00	1	141.724.880,00	1	155.897.368,00	1	155.897.368,00			
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					85.910.000,00		94.501.000,00		103.951.100,00		114.346.210,00		114.346.210,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1	1	1	85.910.000,00	1	94.501.000,00	1	103.951.100,00	1	114.346.210,00	1	114.346.210,00			
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					21.961.500,00		24.157.650,00		26.573.415,00		29.230.757,00		29.230.757,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	1	21.961.500,00	1	24.157.650,00	1	26.573.415,00	1	29.230.757,00	1	29.230.757,00			
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		133.100.000,00		KAB. TANJUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Satuan Pelindungan Masyarakat															JABUN G BARAT	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)			40	100.000.000, 00	40	110.000.000, 00	40	121.000.000, 00	40	133.100.000, 00	40	133.100.000, 00			
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					100.000.000, 00		110.000.000, 00		121.000.000, 00		133.100.000, 00		133.100.000, 00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)			80	100.000.000, 00	80	110.000.000, 00	80	121.000.000, 00	80	133.100.000, 00	80	133.100.000, 00			
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					6.525.960.03 7,00		7.178.556.04 1,00		7.896.411.64 5,00		8.686.052.81 0,00		8.686.052.81 0,00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	12	12	12	6.525.960.037,00	12	7.178.556.041,00	12	7.896.411.645,00	12	8.686.052.810,00	12	8.686.052.810,00			
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					79.061.400,00		86.967.540,00		95.664.294,00		105.230.723,00		105.230.723,00		KAB. TANJUNGPABARAT	
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang	12	12	12	79.061.400,00	12	86.967.540,00	12	95.664.294,00	12	105.230.723,00	12	105.230.723,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Dilakukan Penindakan (Laporan)															
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					36.602.500,0 0		40.262.750,0 0		44.289.025,0 0		48.717.928,0 0		48.717.928,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1	4	4	36.602.500,0 0	4	40.262.750,0 0	4	44.289.025,0 0	4	48.717.928,0 0	4	48.717.928,0 0			
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum					30.000.000,0 0		33.000.000,0 0		36.300.000,0 0		39.930.000,0 0		39.930.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	17	4	10	30.000.000,0 0	10	33.000.000,0 0	12	36.300.000,0 0	15	39.930.000,0 0	15	39.930.000,0 0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota					100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.000, 00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)			1	100.000.000, 00	1	100.000.000, 00	1	100.000.000, 00	1	100.000.000, 00	1	100.000.000, 00			
1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum					25.000.000,0 0		27.500.000,0 0		30.250.000,0 0		33.275.000,0 0		33.275.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraa n ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)			1	25.000.000,0 0	1	27.500.000,0 0	1	30.250.000,0 0	1	33.275.000,0 0	1	33.275.000,0 0			
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					100.000.000, 00		110.000.000, 00		121.000.000, 00		133.100.000, 00		133.100.000, 00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)			30	100.000.000, 00	30	110.000.000, 00	30	121.000.000, 00	30	133.100.000, 00	30	133.100.000, 00			
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					502.500.000, 00		540.150.000, 00		594.165.000, 00		653.581.500, 00		653.581.500, 00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	4	4	502.500.000, 00	4	540.150.000, 00	4	594.165.000, 00	4	653.581.500, 00	4	653.581.500, 00			
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)			4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	1	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)			1		1		1		1		1				
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas					66.000.000,0 0		60.000.000,0 0		66.000.000,0 0		72.600.000,0 0		72.600.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelanggaran Peraturan Daerah															G BARAT	
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)			4	66.000.000,0 0	4	60.000.000,0 0	4	66.000.000,0 0	4	72.600.000,0 0	4	72.600.000,0 0			
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah					16.500.000,0 0		18.150.000,0 0		19.965.000,0 0		21.961.500,0 0		21.961.500,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)			1	16.500.000,0 0	1	18.150.000,0 0	1	19.965.000,0 0	1	21.961.500,0 0	1	21.961.500,0 0			
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					120.000.000, 00		132.000.000, 00		145.200.000, 00		159.720.000, 00		159.720.000, 00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	1	4	120.000.000, 00	4	132.000.000, 00	4	145.200.000, 00	4	159.720.000, 00	4	159.720.000, 00			
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					150.000.000, 00		165.000.000, 00		181.500.000, 00		199.650.000, 00		199.650.000, 00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	1	4	4	150.000.000, 00	4	165.000.000, 00	4	181.500.000, 00	4	199.650.000, 00	4	199.650.000, 00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)															
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		199.650.000,00		KAB. TANJUNGPABARAT	
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	4	4	150.000.000,00	4	165.000.000,00	4	181.500.000,00	4	199.650.000,00	4	199.650.000,00			
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					232.000.000,00		239.700.000,00		248.170.000,00		257.487.000,00		257.487.000,00			
Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)			1	232.000.000,00	1	239.700.000,00	1	248.170.000,00	1	257.487.000,00	1	257.487.000,00			
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)			2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)			12		12		12		12		12				
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS					40.000.000,0 0		40.000.000,0 0		40.000.000,0 0		40.000.000,0 0		40.000.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)			1	40.000.000,0 0	1	40.000.000,0 0	1	40.000.000,0 0	1	40.000.000,0 0	1	40.000.000,0 0			
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah					80.000.000,0 0		80.000.000,0 0		80.000.000,0 0		80.000.000,0 0		80.000.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)			2	80.000.000,0 0	2	80.000.000,0 0	2	80.000.000,0 0	2	80.000.000,0 0	2	80.000.000,0 0			
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS					35.000.000,0 0		35.000.000,0 0		35.000.000,0 0		35.000.000,0 0		35.000.000,0 0		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)			12	35.000.000,0 0	12	35.000.000,0 0	12	35.000.000,0 0	12	35.000.000,0 0	12	35.000.000,0 0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKA SI	KETERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penegakan Peraturan Daerah																
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					77.000.000,0 0		84.700.000,0 0		93.170.000,0 0		102.487.000, 00		102.487.000, 00		KAB. TANJU NG JABUN G BARAT	
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)			1	77.000.000,0 0	1	84.700.000,0 0	1	93.170.000,0 0	1	102.487.000, 00	1	102.487.000, 00			

Kuala Tungkal, 6 November 2025

KEPALA SATUAN



MUHAMMAD IRDAUS INDRA, SE

Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19780928 200604 1 014

4.3 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah terutama dalam urusan pembangunan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat subkegiatan yang penting dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Subkegiatan pendukung program prioritas pembangunan daerah disertai dengan indikator outcome sebagaimana tabel berikut :

Tabel 16. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
1.	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
			1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
			1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah tercapai, ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 17. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	14,21	19,44	26,92	34,40	41,88	49,36	

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Nilai AKIP	Angka	72 (BB)	80,10 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	85,88 (Baik)	86,00 (Baik)	86,30 (Baik)	86,50 (Baik)	86,80 (Baik)	87,00 (Baik)	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu organisasi, program, atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam konteks pemerintahan IKK dapat digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik atau melaksanakan program pembangunan, adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	11,11	14,81	18,51	22,22	25,92	29,63	

Tabel 19. Formulasi Indikator Kinerja Utama SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat

N O	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100$	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	$\frac{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan Keindahan) yang dilaporkan}} \times 100$	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Satlinmas yang dilatih}}{\text{Jumlah seluruh Satlinmas se-Kabupaten}} \times 100$	%	14,21	19,44	26,92	34,40	41,88	49,36	
4.	Nilai AKIP	Nilai Hasil Evaluasi AKIP yang dikeluarkan Inspektorat daerah	Angka	72 (BB)	80,10 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Akumulasi Hasil kuesioner Responden Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,88 (Baik)	86,00 (Baik)	86,30 (Baik)	86,50 (Baik)	86,80 (Baik)	87,00 (Baik)	

Analisa terhadap pencantuman indikator :

1. Indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Indikator ini menghitung jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi dengan seluruh Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali dengan 100%. Untuk target pada tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja menargetkan angka 100% untuk persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

2. Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)

Indikator ini menjadi parameter penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan) yang telah dilaksanakan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator ini dihitung setiap triwulan dan tahunan. Adapun rumusan yang digunakan yakni seluruh pengaduan pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) yang diselesaikan Satpol PP dibagi dengan seluruh pengaduan pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) yang masuk dikali dengan 100%

3. Persentase cakupan perlindungan masyarakat

Indikator ini mencakup satlinmas yang dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya, adapun target yang tercantum berasal dari rumusan jumlah satlinmas yang telah dilatih dibagi seluruh jumlah seluruh satlinmas se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saat ini Satlinmas Desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 1337 orang dengan jmlah yang sudah dilatih hingga tahun 2024 sebanyak 160 orang. Selanjutnya Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan pelatihan untuk satlinmas sebanyak 30 org (tahun 2025), 70 orang (tahun 2026), 100 orang (Tahun 2027), 100 orang (Tahun 2028), 100 orang (Tahun 2029).

4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) didapat dari hasil penilaian kuesioner yang diisi responden atas kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yakni Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Sarana dan prasarana serta Penanganan pengaduan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk periode Renstra 2025-2029 SatPol PP menargetkan nilai mutu pelayanan kategori Baik.

5. Nilai AKIP

AKIP adalah system yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nilai AKIP didapat dari laporan hasil evaluasi (LHE) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pemenuhan dan pelaporan AKIP. Untuk awal periode Renstra Tahun 2025-2029 SatPol PP menargetkan predikat Nilai BB dan pada akhir Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan Predikat Nilai A (Akuntabilitas Tinggi, kinerja efektif dan efisien)

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) ini disusun sebagai pedoman bagi aparatatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari 2025–2029 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029.

5.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025 – 2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025 – 2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 – 2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang pada SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar mendukung pencapaian target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatatur di Sekretariat dan bidang pada SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan,

maka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Selanjutnya, kesungguhan dalam penyusunan Rencana Strategis ini serta pelaksanaannya nanti merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik.

Kuala Tungkal, 6 November 2025

KEPALA SATUAN

MUHAMMAD FIRDAUS INDRA, SE
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19780928 200604 1 014